



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PERUBAHAN KUOTA HAJI

PROVINSI	2026	2025	SELISIH
Jawa Timur	42.490	35.152	+ 7.338
Jawa Tengah	34.122	30.377	+ 3.745
Jogjakarta	3.748	3.147	+ 601
Jawa Barat	29.643	38.723	- 9.080
Jakarta	7.819	7.926	- 107
Banten	9.124	9.461	- 337
Bali	689	698	- 9
Aceh	5.426	4.379	+ 1.047
Sumut	5.913	8.328	- 2.415
Sumbar	3.928	4.613	- 685
Kep. Riau	1.085	1.291	- 206
Riau	4.682	5.047	- 365
Jambi	3.276	2.909	+ 367
Sumsel	5.895	7.012	- 1.117
Babel	1.077	1.065	+ 12
Bengkulu	1.354	1.636	- 282
Lampung	5.827	7.050	- 1.223
Kalbar	1.858	2.519	- 661
Kaltara	489	416	+ 73
Kalteng	1.559	1.612	- 53
Kaltim	3.189	2.586	+ 603
Kalsel	5.187	3.818	+ 1.369
NTB	5.798	4.499	+ 1.299
NTT	516	668	- 152
Sulsel	9.670	7.272	+ 2.398
Sultra	2.063	2.019	+ 44
Sulbar	1.450	1.453	- 3
Sulteng	1.753	1.993	- 240
Sulut	402	713	- 311
Gorontalo	608	978	- 370
Maluku	587	1.086	- 499
Malut	785	1.076	- 291
Papua Barat	447	723	- 276
Papua	933	1.076	- 143

Keterangan

- Pembagian kuota masih 34 provinsi
- 12 provinsi mengalami kenaikan kuota
- 22 provinsi mengalami penurunan kuota
- Kenaikan kuota terbanyak di Jawa Timur (7.338 kursi)
- Penurunan terbanyak di Jawa Barat (9.080 kursi)

Sumber: Kementerian Agama



Grafik: KEMENTERIAN AGAMA RI

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jawa Pos

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



IKON NUSANTARA: Batik Al-Huda yang diproduksi di Desa Sepande sudah diekspor ke berbagai negara. Pemkab ingin pelaku usaha lain belajar dari pengusaha batik tersebut.

Disperindag Dorong 25 UMKM Jajaki Ekspor ke Pasar Asia

SIDOARJO – Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo mendorong 25 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Delta mengembangkan pasar keluar negeri. Tidak hanya ke negara terdekat seperti Malaysia. Mereka juga didorong untuk bisa ekspor ke negara-negara Asia.

Sebanyak 25 pelaku usaha tersebut sudah menjalani pendampingan. Ada beragam

produk yang dihasilkan mereka. Seperti makanan dan minuman (mamin), kerajinan tangan dan fashion.

Dari 25 pelaku usaha yang diberikan pendampingan dua sudah bisa ekspor ke Asia," kata Pengolah Data dan Informasi Disperindag Sidoarjo Miftahudin. Menurut dia, program pendampingan melibatkan Kadin dalam eksekusinya. Selain administrasi, mereka juga dibekali cara melakukan

promosi ke luar negeri.

Miftahudin mengatakan pelaku usaha yang sukses menembus pasar internasional pertama yaitu PT Rumah Makan Deltasari Indah dari Waru. UMKM makanan itu berhasil mengekspor produk frozen food ayam dan bebek goreng ke Timor Leste. "Total transaksi mencapai Rp 82 juta dengan jumlah pengiriman 800 pcs," katanya.

Keberhasilan lainnya disusul dari sektor industri

biomassa. PT Komi Biomass Indonesia yang berlokasi di Trosobo, Taman, sukses menembus pasar Korea Selatan. Perusahaan itu berhasil mengekspor lima kontainer wood pellet berukuran 20 feet dengan nilai transaksi lebih dari Rp 180 juta. "Produk tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan dengan kadar emisi karbon rendah," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kuota Haji Tahun Depan Bertambah 418 Orang

IBADAH HAJI
DI KOTA DELTA
TAHUN 2026

Terbanyak
se-Jawa Timur

SIDOARJO – Kuota calon jemaah haji (CJH) asal Sidoarjo dipastikan meningkat tahun depan. Ada penambahan sebanyak 418 orang dibanding 2025. Sehingga pada tahun 2026, total kuota CJH mencapai 3.246 orang.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo, Imam Mukozali mengatakan jika kenaikan kuota tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai daerah dengan jumlah jemaah haji terbanyak se-Jawa Timur. "Untuk haji 2026, estimasi

kuota dari Sidoarjo ini paling banyak se-Jatim," jelasnya.

144 Jemaah Tunda Keberangkatan

Meski demikian, tidak semua jemaah yang terjadwal berangkat 2026 akan diberangkatkan. Imam menyebut ada 144 jemaah yang memilih menunda keberangkatan. "Mereka menunda satu tahun, dan dijadwalkan berangkat 2027," jelas Imam.

Kemenag telah melakukan penelusuran. Ada beragam alasan kenapa CJH menunda perjalanannya ke Tanah Suci. Sebagian besar karena sakit keras. Ada yang sudah meninggal dan harus dicarikan pengganti.



Untuk haji 2026, estimasi kuota dari Sidoarjo ini paling banyak se-Jatim."

Imam Mukozali

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo

Perkiraan Jadwal Pelunasan Bipih

Imam menyampaikan bahwa jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahap pertama di-

Kuota haji Sidoarjo tahun 2026 mencapai 3.246 jemaah	Ada penambahan 418 orang	Pelunasan biaya direncanakan dibuka akhir bulan ini
------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------

perkiraan dibuka akhir November. "Sebenarnya direncanakan hari ini (kemarin) tapi belum ada persnya. Kami masih menunggu dari pusat seperti apa ketentuannya," ujarnya.

Kemenag Sidoarjo juga mulai mempersiapkan pemeriksaan kesehatan jemaah. Saat ini, Kemenag sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta puskesmas. Langkah terse-

but dilakukan agar jemaah bisa mulai memeriksakan kondisi awal sebelum dinyatakan istitaah.

Menurut Imam, persiapan haji diharapkan berlangsung lebih lancar. "Kami sudah melakukan sosialisasi. Jemaah diminta segera melakukan pengecekan kesehatan dan menyiapkan berkas pelunasan begitu jadwal resmi diumumkan," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Progres Baru 65,9 Persen, Uji Coba Alun-Alun Mundur

SIDOARJO – Alun-Alun Sidoarjo rencananya dibuka lagi sebagai bagian dari proses uji coba pada akhir bulan ini. Namun rencana itu dipastikan tertunda. Sebab saat ini, proyek revitalisasi dinilai berjalan molor.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) DLHK Sidoarjo Hery Santoso mengatakan, harusnya progres mencapai 82 persen pada Jumat (14/11). Namun data terbaru menunjukkan pembangunan baru berada di angka 65,9 persen. "Ada deviasi pekerjaan sekitar 16,6 persen," ujarnya kemarin (19/11).

Menurutnya, salah satu penyebab keterlambatan adalah material *mekanikal, elektrik, dan plumbing (MEP)* yang belum tersedia. Kontraktor disebut berjanji mendatangkan kebutuhan MEP secara bertahap dalam waktu dekat. "Ketersediaan material granit juga belum terpenuhi sepenuhnya sehingga menghambat pekerjaan di lapangan," katanya.

Kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan semakin menambah tantangan. DLHK meminta tambahan tenaga kerja kepada kontraktor agar percepatan bisa dilakukan.

"Kami ingin pembangunan bisa selesai tepat waktu pada 15 Desember mendatang," katanya.

DLHK akan terus melakukan pemantauan ketat. Jika dalam sepekan tidak ada pening-

katan progres, pihaknya akan kembali menggelar Show Cause Meeting (SCM) kedua sebagai langkah evaluasi. SCM merupakan pertemuan formal untuk membahas keterlambatan proyek konstruksi. (eza/hen)

BELUM TUNTAS: Sejumlah fasilitas di alun-alun masih dibangun. Proyek molor berdampak pada ditundanya pengoperasian kembali lapangan di depan pendopo tersebut.



Jawa Pos

Kurang Sebulan, Pembangunan Alun-Alun Baru 65,9 Persen

RADAR SIDOARJO-Waktu pengerjaan Alun-Alun Sidoarjo kurang lebih tersisa satu bulan. Akan tetapi, pembangunan hingga pertengahan November belum mencapai target.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DLHK Sidoarjo, Hery Santoso mengatakan, pembangunan seharusnya sudah mencapai 82 persen pada Jumat, (14/11) kemarin. "Hingga data kemarin baru 65,9 persen yang selesai, ada deviasi peker-

jaan sekitar 16,6 persen," ucapnya, Rabu (19/11).

Dia menjelaskan, salah satu faktor keterlambatan disebabkan item Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP) yang belum tersedia. Karena itu, kontraktor berjanji akan mendatangkan MEP secara bertahap.

Material lain seperti granit juga belum sepenuhnya tersedia. Ditambah cuaca yang memasuki musim hujan juga mengganggu proses pekerjaan.

"Kami sudah meminta tambahan tenaga kerja untuk mengejar keterlambatan proyek,

● Ke Halaman 10



LAMBAT: Pengerjaan pembangunan Alun-Alun Sidoarjo terus berlangsung.



Kurang Sebulan,...

kami ingin pembangunan dapat selesai tepat waktu pada 15 Desember mendatang," tegasnya.

Dengan deviasi 16,6 persen, pihaknya akan terus memantau pembangunan alun-alun secara ketat. Jika dalam seminggu tidak ada progres, pihaknya akan mengadakan Show Cause Meeting (SCM) yang kedua.

SCM adalah pertemuan formal

untuk membahas keterlambatan proyek konstruksi. "Semoga tidak ada SCM lagi, mohon doanya," ujarnya.

DLHK Sidoarjo meminta dukungan dan pengawasan semua pihak agar pembangunan alun-alun berjalan sesuai harapan. Apalagi, proyek tersebut dibangun dengan anggaran yang cukup besar yakni Rp24,6 miliar. "Kami mohon doanya untuk warga Sidoarjo, semoga hasilnya nanti bisa memuaskan semua warga," pungkasnya. (sai/vga)



Kuota Haji Sidoarjo 2026 Naik Paling Banyak di Jawa Timur

KOTA-Kuota Calon Jamaah Haji (CJH) Sidoarjo 2026 diperkirakan meningkat. Kenaikan tersebut diproyeksikan berdampak pada persiapan layanan haji.

Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo, Imam Mukozali mengatakan, estimasi jamaah yang akan diberangkatkan mencapai 3.246 orang. "Jumlah itu naik 418 jamaah dari tahun lalu," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Rabu (19/11).

Kenaikan kuota tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai daerah dengan jama-



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo, Imam Mukozali.

ah haji terbanyak se-Jawa Timur. Kendati demikian, tidak semua jamaah yang terjadwal berangkat 2026 akan diberangkatkan.

Imam menyebut, ada jamaah yang memilih menunda keberangkatan. "Penundaan yang terverifikasi 144, mereka menunda satu tahun, sehingga dijadwalkan berangkat 2027," jelasnya.

Dia juga mulai mempersiapkan pemeriksaan kesehatan jamaah. Karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta puskesmas.

● Ke Halaman 10



Kuota Haji...

"Koordinasi dengan Dinkes dan puskesmas sudah kami lakukan agar jamaah bisa mulai memeriksakan kondisi awal sebelum dinyatakan istitaah," terangnya.

Selain aspek kesehatan, proses administrasi juga mulai disiapkan. Jadwal pelunasan BPIH tahap pertama diperkirakan dibuka akhir November. "Kami masih menunggu dari pusat seperti apa ketentuannya," katanya.

Dengan naiknya kuota dan persiapan yang telah berjalan, Kemenag berharap pelaksanaan haji 2026 bisa lebih lancar. "Jamaah kami minta segera menyiapkan kesehatan dan berkas pelunasan begitu jadwal resmi diumumkan," pungkasnya. (sa/vga)



Kecelakaan Melonjak 1.400 Persen dalam Setahun di Jalur Tengkorak

KOTA-Lonjakan kecelakaan di jalur tengkorak Sidoarjo kian mengkhawatirkan. Dalam kurun satu tahun, angka kecelakaan di sejumlah titik blackspot naik hingga 1.400 persen, menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu titik paling rawan di Jawa Timur (Jatim).

Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sidoarjo, Iptu Kharisma Afriansyah menegaskan, kelalaian pengendara masih menjadi faktor dominan pemicu kecelakaan.

"Mayoritas kecelakaan terjadi karena pengendara mengabaikan rambu-rambu dan tidak mematuhi aturan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk lebih waspada dan disiplin, terutama saat melintas di jalur tengkorak," ujar Kharisma, Rabu (19/11).

Upaya tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan disiplin pengguna jalan. Karena, seperti ditegaskan Iptu Kharisma, keselamatan pengendara tetap yang utama.

Peningkatan drastis itu juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Jawa Timur, Tamrin Silalahi. Ia menyebut, sepanjang 2024 hingga September 2025, tren kecelakaan di jalur rawan tersebut melonjak tajam, baik korban meninggal maupun luka-luka.

"Jika tahun lalu hanya dua orang yang meninggal, maka pada 2025 ini sudah delapan orang. Korban luka juga naik signifikan, dari embilan menjadi 135 orang. Ada kenaikan sekitar 1.400 persen," jelas Tamrin.

Menurut Tamrin, beban biaya santunan kecelakaan juga meningkat. Pada 2024, Jasa Raharja mengeluarkan sedikitnya Rp 600 miliar untuk penanganan kecelakaan di Jawa Timur.

"Rata-rata ada 15 orang meninggal dunia per hari, dan 70 persen di antaranya adalah tulang punggung keluarga," tandasnya.

Untuk menekan risiko kecelakaan, Jasa Raharja bersama Satlantas Polresta Sidoarjo melakukan berbagai langkah pencegahan. Termasuk sosialisasi ke aparatur kecamatan dan desa di sekitar titik blindspot, pemasangan spanduk keselamatan, serta kampanye intensifikasi keselamatan transportasi di jalur rawan seperti Raya Balongbendo, Sidoarjo. (dik/vga)



NAHAS: Kondisi korban kecelakaan di jalur tengkorak Balongbendo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SUDAH RATA: Polantas Sidoarjo telah menutup lubang jalan berdiameter 90 sentimeter di Jalan Raya Jati kemarin (19/11).

EDI SUDRAJAT/JAWA POS

Polantas Keliling Uruk Jalan Berlubang di Sidoarjo

SIDOARJO - Satlantas Polresta Sidoarjo mengerahkan jajarannya untuk membantu menutup jalanan yang berlubang. Kondisi itu dinilai membahayakan pengendara dan berpotensi kecelakaan. Kanit Turjawali AKP Ali Rifqi

Mubarak menjelaskan, salah satu jalan yang ditambal itu di Jalan Raya Jati, Sidoarjo Kota. Tepatnya di sisi timur akses menuju Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Diameter lubang jalan sekitar 90 sentimeter. "Kedalaman-

nya juga lumayan. Menurut warga, banyak pengendara yang kejeplong," ujarnya kemarin (19/11).

Ali menambahkan, anggota satlantas menutup lubang itu dengan material batu dan tanah dari sekitar. (edi/jun)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Penanganan Banjir di Sidoarjo Harus Lebih Jelas dan Terukur

SIDOARJO, SURYA - DPRD Sidoarjo terus berusaha mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar lebih maksimal dalam upaya penanganan dan pengendalian banjir. Semua program terkait banjir, diharapkan bisa lebih jelas, terukur, dan tepat.

Termasuk program penanganan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, hingga penanganan saat *emergency*. Semua diharapkan bisa terukur dan tepat, supaya banjir tidak lagi menjadi langganan di Sidoarjo.

"Sidoarjo ini Kota Delta. Dilewati banyak sungai besar dan kecil, sehingga potensi banjir cukup tinggi. Belum lagi posisi Sidoarjo juga dekat dengan laut, ada juga potensi banjir rob saat air laut pasang," kata Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.

Saat sungai tiba-tiba meluap atau banjir rob terjadi misalnya, bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah harus sudah disiapkan dengan matang. Mulai dari penanganan bencananya, sampai penanganan terhadap warga yang terdampak.

Yang lebih penting, imbuh Nasih, program-program dan strategi untuk mencegah terjadinya banjir. Pengerukan sungai atau normalisasi semua saluran memang sangat penting. Kemudian penyediaan rumah pompa di titik rawan, pompa portable, dan sebagainya, juga tidak kalah penting.

"Namun yang juga sangat penting adalah strategi dan sistemnya. Program penanganan banjir harus berkesinambungan.

Bukan hanya saat terjadi banjir, tapi bagaimana upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan," ujarnya.

Perlu ada *masterplan* penanganan banjir yang terhubung dengan rencana detail tata ruang (RDTR) di semua wilayah. Pemkab Sidoarjo harus punya itu.

Kemudian dinas-dinas bisa merancang program yang sesuai dengan tupoksinya, berdasar *masterplan* yang ada. Supaya programnya tidak tumpang-tindih.

Dengan adanya *masterplan* yang terkoneksi RDTR, pemetaan kawasan bisa lebih jelas. Mana kawasan industri, kawasan pertanian, permukiman, dan sebagainya. Demikian halnya potensi banjir yang ada, semua bisa terpetakan, sehingga penanganannya bisa maksimal.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat. Politisi PDI Perjuangan itu bahkan berulang kali mengingatkan Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan rencana pembuatan *masterplan* penanganan banjir di Sidoarjo.

"Dengan *masterplan* yang jelas, program penanganan banjir juga bisa lebih jelas dan terukur. Tidak asal-asalan saja," kata Dayat, panggilan Choirul Hidayat.

Dia khawatir, kalau *masterplan* tidak segera dibuat, penanganan banjir akan menyesuaikan selera kepala daerah yang menjabat.

"Harusnya kan ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang disusun oleh para ahli,

kemudian dilaksanakan oleh siapapun yang menjabat. Sehingga penanganan banjir bisa maksimal dan terukur," tandasnya.

Pengerukan sungai atau normalisasi saluran, menurut Dayat, memang penting untuk meminimalisir potensi banjir. Tapi diyakini banjir bakal terus terjadi setiap musim hujan, dan pola penanganannya juga akan terus begitu-begitu saja sampai kapanpun, selama belum ada *masterplan* atau strategi yang terukur dalam penanganan banjir di Sidoarjo.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo M Ainur Rahman menyebut bahwa *masterplan* penanganan banjir di Sidoarjo masih dalam proses penyusunan.

Menurutnya *masterplan* itu sudah melalui proses pembahasan lintas instansi. Karena penanganan banjir bukan cuma kewenangan pemerintah daerah, tapi juga ada kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

"Sehingga butuh kolaborasi antar instansi. Yang jelas kita sedang menyiapkan *masterplan* penanganan banjir secara menyeluruh. Sekarang ini masih dalam proses penyusunan," kata Ainur.

Dokumen penanganan banjir itu meliputi berbagai hal. Termasuk pemetaan, strategi teknis, hingga kebijakan jangka panjang dalam upaya menanggulangi banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Nantinya, *masterplan* itu bakal menjadi rujukan pemerintah dalam menjalankan program-pro-



“
Perlu strategi yang jelas, terukur, dan tepat, dalam upaya penanganan dan penanggulangan banjir di Sidoarjo

Ketua DPRD Sidoarjo
Abdillah Nasih

gram penanganan banjir di Kota Delta. "Sehingga, penanganan banjir bisa dilakukan secara terencana baik dan terukur," ujarnya.

Namun, lanjut Ainur, keberhasilan dari berbagai program yang disiapkan itu tetap saja bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena, sebagai apapun program pemerintah jika tidak didukung oleh warga dengan partisipasi yang baik, maka potensi keberhasilannya sangat kecil.

Partisipasi itu, dalam hal pencegahan banjir, diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya program normalisasi sungai, ketika masyarakat masih banyak yang buang sampah ke sungai atau ke saluran air, tentu banjir akan tetap mengintai Sidoarjo (uff)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Undang Dahlan Iskan Jadi Pembicara Diskominfo Ajak Pegiat Medsos Bangun Citra Positif Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo mengundang pegiat media sosial dalam Forum Kolaborasi Gov x Creator Connect, di salah satu hotel di Malang, Senin (17/11).

Mereka diajak kolaborasi membangun citra positif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Forum yang pertama kali digelar diskominfo ini mengangkat tema *Kolaborasi Komunikasi Publik Berbasis Komunitas, Media Industri, dan Konten Kreatif*.

Lima narasumber berbot diundang dalam forum yang dilaksanakan selama dua hari itu (17-18 November). Antara lain tokoh pers nasional Dahlan Iskan, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Deny Haryanto, serta pemilik akun Instagram @ndorokakung Wicaksono dan desainer grafis Kementerian Keuangan RI, M Thorig.

Kegiatan itu diikuti admin medsos OPD serta seluruh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) OPD dan instansi vertikal Sidoarjo. Mulai dari olresta Sidoarjo, BNN Sidoarjo, serta *influencer* dan kelompok informasi masyarakat (KIM).

Plt Kepala Diskominfo Eri Sudewo mengatakan, saat ini manusia berada era di mana informasi bergerak sangat cepat. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat. "Komunikasi publik menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah harus mampu

menghadirkan komunikasi publik yang mudah dipahami masyarakat," terangnya.

"Dalam menghadapi perubahan ini, komunikasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan langkah pembangunan dapat dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Eri Sudewo juga menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Layak lewat cara itu pemerintah mampu menghadapi tantangan disinformasi dan dinamika opini masyarakat. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.

Dibutuhkan peran media, komunitas maupun para kreator konten dalam menjembatani interaksi publik di ruang digital. "Forum ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi publik yang lebih kreatif, kredibel, dan inklusif," jelasnya.

Eri Sudewo berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan kerja sama nyata antara OPD dan para kreator konten untuk menghadirkan narasi pembangunan yang lebih humanis dan mudah diterima masyarakat. Lewat forum semacam ini diharapkannya juga akan mendorong lahirnya inovasi dalam penyampaian pesan publik melalui media kreatif, *storytelling*, dan pendekatan digital yang relevan. Apalagi, Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperkuat transformasi digital pemerintahan. (*/kri/san/epe)



Tokoh pers nasional Dahlan Iskan mengajak pegiat medsos berkolaborasi membangun citra positif Kabupaten Sidoarjo.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
PROVINSI JAWA TIMUR

JL KREMBANGAN BARAT NOMOR 57 SURABAYA, TELP (031)3531478, FAX (031)3531477

PENGUMUMAN

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 95 / Kelurahan Kapasari

Nomor: HP.02.04/3629/300-35.80/XII/2025

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025, Saudara Indatur Rochmania qq Angeline CS mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan No. 95 / Kelurahan Kapasari dengan Nomor Berkas 48683/2025 atas Tanah yang terletak di Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.

Bahwa terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan No. 95 / Kelurahan Kapasari tidak diketemukan / Hilang, sebagaimana SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN NOMOR : SKTLK / 3729 / X / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA SURABAYA, tanggal 15 Oktober 2025.

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 95 / Kelurahan Kapasari, atas nama GUNAWAN WIBISONO, Luas 220 m², dengan nomor seri blanko sertipikat 004485769 telah berakhir haknya pada tanggal 23-09-1980, sehingga bidang tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Oleh karena itu maka:

Bagi yang memegang / menyimpan dan atau menemukan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 95 / Kelurahan Kapasari, atas nama GUNAWAN WIBISONO, Luas 220 m², dengan nomor seri blanko sertipikat 004485769 agar menyerahkan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan alamat Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, karena sertipikat tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang Sah. Demikian pengumuman untuk diketahui khalayak umum.

Surabaya, 19 NOV 2025

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Surabaya II
Kepala Suku Bagian Tata Usaha

Atik Sutisnowati, S.H., M.H.
NIP. 19700212 199803 2 002



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

• GALERI FOTO •

Invitasi Bola Voli Nasional di Sidoarjo, Berebut Tropy Bhayangkara Cup



Ketua PBVSI Sidoarjo, Kombespol Christian Tobing, didampingi Bupati Sidoarjo, membuka pertandingan bola voli indoor di GOR serba guna Sidoarjo.

Berbagai daerah di Indonesia mengikuti invitasi tingkat nasional kejuaraan Bola voli indoor u-17 dan bola voli pantai u-21, yang digelar di Kabupaten Sidoarjo.

Oleh:

Alikusyanto, Kabupaten Sidoarjo

Ketua Harian PBVSI Sidoarjo, Joko Supriyadi menyampaikan invitasi bola voli indoor digelar sejak 16 November, akan berakhir hingga 20 November, di GOR serba guna Sidoarjo. "Diikuti 24 tim putra dan 21 tim putri dari berbagai kota di Indonesia," kata Joko, Senin (17/11/2025) kemarin, disela-sela pembukaan secara resmi kedua invitasi cabang olahraga tersebut, di GOR serba guna Sidoarjo.

Sedangkan invitasi bola voli pantai akan dimulai pada 20 - 24 November, di lapangan bola voli pantai Sidoarjo. Dalam cabor ini diikuti oleh 16 tim putra / putri. Diantaranya dari Kalimantan selatan, Sum-sel, DKI, Bali, NTB, DIY, dan tuan rumah Sidoarjo.

Dalam kejuaraan ini, kata Joko, selain memperebutkan trofi Bhayabgkara, juga juga memperebutkan uang, total sebesar Rp200 juta. Bupati Sidoarjo Sub-andi, Ketua PBVSI Sidoarjo yang juga Kapolresta Si-

doarjo Kombespol Christian Tobing, Kadisporapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto serta Ketua umum KONI Sidoarjo Imam Mukri Affandi, hadir dalam pembukaan resmi tersebut.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing berharap invitasi tingkat nasional tersebut berjalan lancar. Sehingga melahirkan juara yang berkualitas.

Kegiatan tersebut menurutnya sangat penting. Tidak hanya bagi atlet Sidoarjo saja, tetapi juga bagi semua atlet di Indonesia. Sebab akan bisa bermanfaat dalam menjangkau bibit atlet yang berprestasi.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Dispora Sidoarjo, sehingga kegia-

tan tingkat nasional ini bisa berjalan lancar," komentarnya dalam pembukaan resmi invitasi bola voli indoor dan bola voli pantai tersebut.

Ketua umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, mengatakan kegiatan invitasi tersebut banyak manfaatnya. Tidak hanya pada cabang olah raga saja, tetapi juga pada bidang ekonomi, selama event nasional ini berlangsung di Kota Sidoarjo. Catatan PB-VSI Sidoarjo, selama tahun 2025, atlet bola voli indoor Sidoarjo telah meraih sejumlah prestasi gemilang. Diantaranya, medali emas putra Porprov IX tahun 2025, juara 1 putra piala walikota Surabaya 2025. [kus.wwn]

HARIAN
Bhirawa
Buku Saku Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Milad Muhammadiyah ke-113, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Apresiasi Kiprah dalam Membangun Peradaban Bangsa



Foto : Suyarno, SH, MH, Rabu (19/11/2023). (foto : wartanusa.net)

SIDOARJO – Peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Suyarno, S.H., M.H. Ia menilai Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa melalui pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial.

Suyarno menyampaikan ucapan selamat sekaligus penghargaan atas peran Muhammadiyah yang sudah lebih dari satu abad berkiprah untuk masyarakat. Menurutnya, organisasi ini tidak hanya dikenal sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai motor sosial yang membawa perubahan nyata.

"Saya mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah ke-113. Semoga semangat pengabdian dan komitmen Muhammadiyah untuk memajukan kesejahteraan bangsa semakin kuat di masa mendatang," ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Ia menambahkan, berbagai lembaga yang didirikan Muhammadiyah mulai sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, kata dia, menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa.

Suyarno juga menilai nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kemanusiaan yang diusung Muhammadiyah menjadi teladan bagi organisasi lainnya di Indonesia. Melalui dakwah berkemajuan, Muhammadiyah dinilai mampu menghadirkan ajaran Islam yang ramah, mencerdaskan, dan mendorong kemajuan peradaban.

"Di usia 113 tahun, Muhammadiyah tetap relevan dan menjadi pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan Muhammadiyah terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," tambahnya.

Ia berharap momentum Milad ke-113 ini dapat memperkuat semangat kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam melanjutkan gerakan sosial, pendidikan, dan dakwah yang telah menjadi ciri khas organisasi tersebut sejak awal berdiri.

Peringatan Milad Muhammadiyah tahun ini tidak hanya dirayakan warga persyarikatan, tetapi juga diapresiasi berbagai tokoh pemerintahan, akademisi, serta masyarakat yang merasakan manfaat dari beragam program kemanusiaan Muhammadiyah. Organisasi yang berdiri sejak 1912 ini terus menjadi kekuatan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, sehat, dan berkeadilan sosial.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor, kerja sama antara Sidoarjo dan Muhammadiyah diharapkan semakin kuat sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (dar/nata/red)



Saat Keadilan Terasa Jauh: Warga Pembeli Sah Menangis Menyaksikan Rumahnya Dieksekusi



Filesatu.co.id, SIDOARJO | SUASANA tegang dan haru menyelimuti Desa Jumptrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, pada Rabu (19/11/2025). Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Sidoarjo melaksanakan eksekusi pengosongan lahan seluas 7.798 meter persegi yang telah ditempati oleh puluhan keluarga.

Eksekusi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini berdasarkan surat pemberitahuan No. 2217/PAN.PN.W14.U8/1K.2/10/2025 dan merujuk pada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk Kasasi No. 1833 K/PDT/2018. Sengketa ini melibatkan Moch. Agus Alfian sebagai pemohon eksekusi melawan PT Ciptaning Puri Wardani dkk selaku pihak pengembang.

Di tengah konflik hukum antara pemohon dan developer, warga yang telah membeli dan menempati rumah secara sah merasa paling dirugikan. Mereka menegaskan bahwa seluruh proses transaksi dengan pengembang dilakukan dengan prosedur resmi dan beritikad baik, sehingga seharusnya tidak menjadi korban dari sengketa tersebut.

"Sebenarnya warga siap membeli kembali kepada pemohon. Tapi pihak pemohon tetap mengosongkan rumah karena merasa memiliki lahan itu dan merasa dirugikan oleh PT Cipta Puri Wardani," ungkap salah seorang warga yang kecewa, menggambarkan upaya mereka mencari jalan tengah.

Adi Darmawan, kuasa hukum pemohon eksekusi, membenarkan tindakan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan amar putusan.

"Kami hanya menjalankan putusan pengadilan. Pengadilan Tinggi telah memenangkan Agus, sehingga eksekusi wajib dilaksanakan sesuai prosedur," tegasnya.

Sebaliknya, Libertius Boymau, kuasa hukum warga, menilai tindakan ini telah mengabaikan hak konstitusional masyarakat. "Warga adalah pembeli sah. Mereka tidak boleh menjadi korban dari masalah yang tidak mereka ciptakan. Ini adalah ketidakadilan," ujarnya.

Proses eksekusi berlangsung di bawah penjagaan ketat dari personel gabungan Polres Sidoarjo, Kodim 0816, Satpol PP, serta Forkopimcam Sukodono. Area perumahan sempat dikosongkan sekitar pukul 10.00 WIB setelah negosiasi panjang.

Namun, ketegangan memuncak satu jam kemudian. Sekitar pukul 11.00 WIB, warga meluapkan kekecewaan mereka dengan membakar ban dan beberapa perabotan di depan gerbang perumahan sebagai simbol protes atas keputusan yang mereka nilai tidak adil.

Puncaknya, proses eksekusi akhirnya dihentikan secara sementara pada pukul 12.00 WIB setelah terjadi perdebatan sengit di lokasi, termasuk argumen dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penghentian ini diputuskan oleh petugas di lapangan untuk menghindari terjadinya benturan dan hal-hal yang tidak diinginkan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MEDIASI SENGKETA PARKIR: PT ISS Siap Setor Sesuai Potensi Pendapatan, Dishub Sidoarjo Ingin Swakelola



NUSADAILY.COM- SIDOARJO : Dua tahun bersengketa antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-KSO dalam pengelolaan parkir di Sidoarjo, belum juga ada penyelesaian. Bahkan pihak Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo yang memproses perkaranya, sampai saat hari ini,--Rabu (19/11/2025) siang, belum mengeluarkan keputusan menyelesaikan sengketa kedua bela pihak.

Direktur Operasional PT ISS-KSO, Dian Sutjipto mengatakan, senyampang menunggu putusan PN Sidoarjo, pihaknya sudah berniat baik (goodwill) untuk menyelesaikan permasalahan parkir. "Saran PN adalah mediasi. Tentunya kami siap dan memang ingin agar segera selesai, termasuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban," katanya, Rabu (19/11/2025) siang tadi.

Terjadinya sengketa ini berawal ketika Dinas Perhubungan Sidoarjo memutus kontrak kerjasama karena menilai PT ISS tidak bisa melaksanakan kewajibannya, menyetor hasil pengelolaan parkir sebesar Rp 6,6 miliar per tahun sejak 2024. Atas keputusan itu, PT ISS akhirnya mengajukan gugatan hukum ke PN Sidoarjo.

"Selama ini kami selalu mengalah, dan yang kami ingin dilakukan addendum karena banyak titik-titik parkir yang dianggap potensi itu, ternyata fiktif. Sehingga potensi pendapatan riel di lapangan jauh dari target sebesar Rp 6,6 miliar," ujarnya.

Dia pun membeber kronologis kerjasama dengan Dishub yang sejak awal banyak melakukan kesalahan prinsip dan mendasar. Salah satunya adalah memasukkan data palsu atau fiktif ke dalam surat perjanjian kerjasama. "Ruh dan substansi dari perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan layanan parkir dan gol yang diinginkan Dishub adalah pendapatan. Maka kalau datanya salah atau fiktif itu pasti berdampak kepada pendapatan. Apa itu bukan penipuan," ujarnya.

Dari hasil kajian PT ISS yang juga melibatkan akademik, lanjut Dian bahwa perhitungan potensi pendapatan dari pengelolaan parkir di Sidoarjo sebagai pendapatan asli daerah berkisar Rp 3 miliar. "Atau paling besar hanya Rp 4 miliar. Sedangkan target untuk kami sebesar Rp 6,6 miliar pertahun, ini tentunya tidak fair, tidak adil buat kami," tegasnya. "Kami pun minta adendum agar



keajiban setor disesuaikan dengan potensi riel di lapangan berkisar Rp 3 miliar atau paling besar Rp 4 miliar,” tambahnya.

Kajian lapangan dilakukan PT ISS ini rupanya selaras dengan hasil kajian potensi parkir Sidoarjo yang dilakukan Dishub Sidoarjo pada 2024. Kajian itu berdasarkan jumlah kendaraan 1.702.208 unit, rinciannya roda empat (207.376), kendaraan besar jenis bus dan truk (71.675) dan sepeda motor (1.423.157), berikut nilai retribusinya dan jumlah titik parkir.

Di mana, untuk potensi pendapatan dari hasil parkir terbagi tiga asumsi, yakni asumsi pesimis, moderat hingga asumsi optimis. Dari tiga asumsi itu, paling realitis bisa direalisasi adalah senilai Rp 7 miliar. Selanjutnya dikurang biaya operasional 40 persen, termasuk honor para jukir. Sehingga sisanya (60%) menjadi pendapatan asli daerah (PAD), atau sekitar Rp 4 miliar.

Perlu diketahui juga bahwa sebelum dikerjasamakan dengan PT ISS, pengelolaan parkir di Sidoarjo cenderung minim. Bahkan data pada 2021,--ketika diberlakukan parkir berlangganan, pendapatan berkisar Rp 1,8 miliar, sedangkan pengeluaran sebagai biaya operasional sebesar Rp 6 miliar. Tidak malah hasil sebagai PAD, justru terjadi defisit antara pendapatan dan pengeluaran.

Sementara itu, Budi Basuki, Kepala Dishub Sidoarjo ketika dikonfirmasi cenderung menunggu putusan PN Sidoarjo dalam menyelesaikan sengketa. “Ditunggu apa yang menjadi keputusan PN Sidoarjo. Saat ini masih belum ada putusan,” ujarnya.

Dalam persoalan ini, pihaknya berencana swakelola. Artinya, parkir di wilayah Sidoarjo akan ditangani langsung Dishub Sidoarjo, setelah kerjasama dengan PT ISS berakhir 2025. Pihaknya juga memastikan bahwa para juru parkir (jukir) yang selama ini bertugas tetap akan diberdayakan dalam swakelola tersebut. “Saat ini kami mempersiapkan berbagai sarana pendukung untuk kelancaran pengelolaan parkir. Di antaranya ID card untuk jukir, karcis parkir, dan penetapan titik-titik lokasi parkir,” ujarnya.

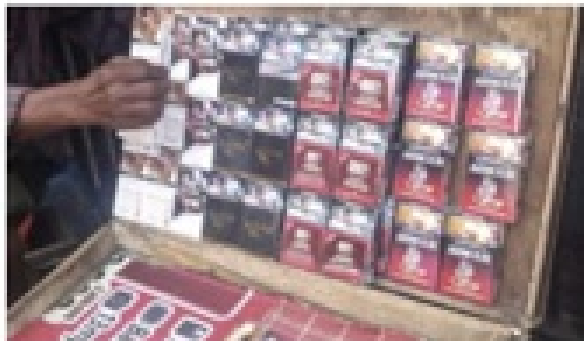
Pihaknya juga membuat konsep dalam upata intensifikasi pendapatan sekaligus meminimalisasi kebocoran pendapatan atas swakelola parkir. Salah satunya mengeluarkan voucher berlangganan parkir bagi semua jenis kendaraan. “Voucher langganan ini tentunya bisa efisiensi bagi masyarakat. Karena harga lebih murah, dan ini bisa diberlakukan bagi ASN maupun masyarakat umum,” ujarnya.

Ditambahkan, rencana program voucher itu juga sudah dipresentasikan kepada DPRD Sidoarjo, namun masih dalam tahap penyempurnaan. Pihaknya berharap pengelolaan parkir yang nantinya dijalankan Dishub dapat berjalan lebih baik dan lebih tertata.

Sementara itu, target kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum ditetapkan. Dishub masih melakukan penghitungan lebih detail sebelum menentukan angka resmi. “Soal target PAD, Kami masih melakukan pembahasan penghitungan secara detail dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” tuturnya. (*cak ful)



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo : Rokok Ilegal Sangat Berbahaya dan Merugikan Pemerintah



Liputan5news.com - Sidoarjo. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo bagaikan jamur di musim hujan. hal itu fakta di lapangan banyak penjual rokok ilegal yang terang-terangan menjual dagangannya ke konsumen (penikmat rokok) dengan menggunakan sepeda motor.

Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih intens mencegah dan memberantas peredaran rokok yang tidak bercukai (ilegal) karena sangat merugikan pemerintah dan kesehatan bagi penikmat rokok sendiri.

Menurut Cak Nasih panggilan akrab, rokok ilegal berpotensi bahaya karena tidak diketahui kandungannya tidak ada proses pengawasannya sehingga dikhawatirkan mengandung zat-zat yang dipandang berbahaya.

"Agar pemerintah ataupun aparat yang berwenang melakukan sikap pengawasan lebih rutin di lapangan baik di toko-toko kelontong atau penjual yang menggunakan sepeda motor. Jika diketahui mengedarkan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku." tegasnya. Selasa (17/11/2025).

Ia menambahkan dengan banyaknya peredaran rokok ilegal sangat berefek negatif bagi kelangsungan usaha UMKM dan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Karena itu, sangat urgen bagi pemerintah untuk terus menerus dan kontinu melakukan kontrol dan pengawasan karena resikonya kepada masyarakat ataupun perokok itu sendiri.

Politikus PKB ini, juga menyarankan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pelaku usaha rokok agar menggunakan cara persuasif dengan cara pembinaan keterampilan, perizinan, kepada pelaku UMKM.

"Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa membeli rokok ilegal dan murah justru berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan pembangunan daerah sekitar." urai Cak Nasih yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo.

Sementara itu, ditemui di tempat terpisah Kasat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Drs. Yany Setyawan menyatakan, bahwa pendekatan terhadap penjual rokok dan telah dilakukan operasi rokok ilegal.

"Intensif kita lakukan sekali, kegiatan ini harus didampingi oleh kami, belum bisa melaksanakan pendekatan sendiri tanpa didampingi, oleh kemudian hasil barang bukti ini semua dibawa dan diamankan," terang Yany.

Lanjutnya, bulan Desember minggu kedua akan diadakan pemusnahan rokok ilegal. Diperkirakan 9 juta batang, rencananya ada dua tempat pemusnahan yakni di Pendopo dan Porong (Yanti)



SIDOARJO, SOROTMATA.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo mengundang pegiat Media Sosial/Medias dalam Forum Kolaborasi Gov x Creator Connect di Hotel Rayz UMM, Malang, Senin, (17/11/2025). Mereka diajak kolaborasi membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Forum yang pertama kali digelar Diskominfo Sidoarjo itu mengangkat tema “Kolaborasi Komunikasi Publik Berbasis Komunitas, Media Industri, dan Konten Kreatif.”

Tidak tanggung-tanggung, Diskominfo Sidoarjo mengundang lima narasumber berbobot dalam forum yang dilaksanakan dua hari ini, (17-18 November 2025). Antara lain CEO Media Diway Dahlan Iskan, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdilah Nasih, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Denny Haryanto serta pemilik akun Instagram @ndorokakung Wicaksono dan Desainer Grafis Kementerian Keuangan RI, M. Thoriq. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh admin Medias OPD serta seluruh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) OPD dan Instansi Vertikal Sidoarjo seperti dari Polresta Sidoarjo, BNN Sidoarjo serta Influencer dan kelompok Informasi Masyarakat/KIM.

Plt. Kepala Diskominfo Sidoarjo, Eri Sudewo dalam sambutannya membuka forum tersebut menyampaikan bahwa saat ini manusia berada era di mana informasi bergerak sangat cepat. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat. Menurutnya komunikasi publik menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah harus mampu menghadirkan komunikasi publik yang mudah dipahami masyarakat.

“Dalam menghadapi perubahan ini, komunikasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan langkah pembangunan dapat dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Eri Sudewo juga menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Ia yakin lewat cara itu pemerintah mampu menghadapi tantangan disinformasi dan dinamika opini masyarakat. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan peran media, komunitas maupun para kreator konten dalam memfasilitasi interaksi publik di ruang digital.

“Forum ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi publik yang lebih kreatif, kredibel, dan inklusif,” ucapnya.

Eri Sudewo berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kerjasama nyata antara OPD dan para kreator konten untuk menghadirkan narasi pembangunan yang lebih humanis dan mudah diterima masyarakat. Lewat forum semacam ini diharapkan juga akan mendorong lahirnya inovasi dalam penyampaian pesan publik melalui media kreatif, storytelling, dan pendekatan digital yang relevan.

“Pada akhirnya diharapkan dapat terbentuk ekosistem komunikasi publik Kabupaten Sidoarjo yang responsif, modern, dan berkelanjutan,” harapnya.

Eri Sudewo juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memperkuat transformasi digital pemerintahan. Kualitas layanan informasi akan terus ditingkatkan dan ruang partisipasi publik akan dibuka lebih luas lagi. Namun upaya tersebut harus dilakukan Bersama.

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mengapresiasi kehadiran seluruh peserta, termasuk rekan-rekan kreator, media, komunitas, dan mitra pemerintah yang telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Nuri)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pendapat Ketua DPRD Sidoarjo, Atas Maraknya Jual Rokok Ilegal



PARIWARA KEGIATAN
DPRD KABUPATEN SIDOARJO



Ketua
H. Abdillah Nasih, S.M.

Wakil Ketua
H. Suyarno, S.H., M.H.

Wakil Ketua
H. Karyo, S.H.

Wakil Ketua
H. Wath'Indono, S.H.

Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Pendapat Ketua DPRD Sidoarjo, atas maraknya jual rokok ilegal. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih intens dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo bagaikan jamur di musim hujan, hal itu fakta di lapangan banyak penjual rokok ilegal yang terang-terangan menjual dagangannya ke konsumen (penikmat rokok) dengan menggunakan sepeda motor.

Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih intens mencegah dan memberantas peredaran rokok yang tidak bercukai (ilegal) karena sangat merugikan pemerintah dan kesehatan bagi penikmat rokok sendiri.

Saat Abdillah Nasih ditemui reporter Arjunanusantaranews.com, pada Senin (17/11/2025) di ruang kerjanya telah menyampaikan bahwa untuk mengurangi peredaran rokok tanpa cukai pada prinsipnya telah mendorong teman – teman eksekutif akan juga mungkin aparat yang berwenang untuk menertibkan termasuk juga melakukan pembinaan. Karena rokok ilegal itu setidaknya bisa membunuh UKM – UKM yang ada.

Yang kedua juga potensi bahaya, karena ketika ilegal tidak diketahui kandungannya, tidak ada semacam proses pengawasannya, sehingga dikhawatirkan justru nanti jadi zat – zat yang berbahaya. Yang ketiga adalah otomatis bisa sangat mengurangi pendapatan cukai.

Harapan kami agar eksekutif, Pemerintah dan aparat yang ada harus menertibkan itu lagi dan memberikan pembinaan. Dan sudah ada regulasinya saya pikir bagaimana teman – teman eksekutif dalam hal ini telah melakukan sidak – sidak, pengawasan – pengawasan di lapangan baik itu toko kelontong ataupun baik di UKM – UKM yang ada, itu kontrol pengawasannya ketat sekaligus ketika diketahui ada tindakan dan ada pembinaan, jelas Nasih.



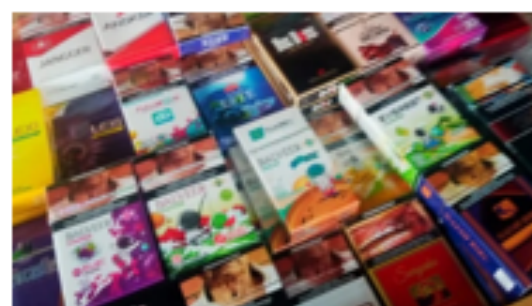
Ketika ditanya seberapa jauh efek dari peredaran rokok ilegal yang ada di Sidoarjo, Abdillah Nasih memberikan kehangatan dalam menjawab, bahwa efeknya juga bisa potensi berbahaya juga, karena memang harus diketahui kandungannya, dan harus diketahui tingkat apakah ini tingkat legal saja, jelas – jelas ini mengandung apa untuk kesehatannya itu harus tau. Apalagi ilegal yang tidak diketahui komposisinya. Saya pikir ini menjadi urgen bagi pemerintah untuk terus melakukan kontrol dipengawasan.

Ditambahkan bahwa resikonya ada pada masyarakat ataupun rokok itu sendiri. Bahwa menjamurnya rokok – rokok semacam itu, mungkin daya beli masyarakat perokok khususnya itu bisa dikatakan, ” Sing penting rokokan” Ketika dia beli rokok yang sudah bermerk tidak mencukupi, dia nyasar ke rokok – rokok yang lain ketemunya rokok non branded atau rokok ilegal. Sehingga ini yang di ambil pengusaha – pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk menyasar ke masyarakat ” Sing penting gelem merokok tadi itu”. kata Nasih.

Pendapat Ketua DPRD Sidoarjo, atas maraknya jual rokok ilegal. Kalau ini tidak di antisipasi, tidak ada pengawasan akan merugikan UKM yang legal, merugikan pendapatan dan juga otomatis merugikan kesehatan. Secara kontinyu terus menerus pemerintah atau aparat yang punya wewenang untuk melakukan sidak – sidak atau pengawasan, kontrol – kontrol dan disamping itu pihak OPD melakukan pembinaan kepada UKM – UKM yang ada di Sidoarjo, palaku – pelaku rokok untuk memberikan masukan, pembinaan dan ketrampilan. Bahwa sebenarnya dengan legal ini bisa mudah, termasuk perijinannya, cukainya dan macam – macam.

Kepada masyarakat, agar pemerintah juga memberikan pembinaan kepada masyarakat edukasi agar dengan mudah terpancing, mudah membeli, mudah hanya gara – gara rokok murah tetapi justru itu rokok – rokok berbahaya bagi kesehatan.

Pendapat Ketua DPRD Sidoarjo atas maraknya jual rokok ilegal. Ia menambahkan dengan banyaknya peredaran rokok ilegal sangat berefek negatif bagi kelangsungan usaha UMKM dan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, pungkasnya.



Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Senin (17/11/2025) Kasat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Drs. Yany Setyawan menyampaikan bahwa telah dilakukan operasi rokok ilegal, itu sebagai tugas kami membantu bea cukai Sidoarjo yang ada di Jl. Juanda, bersama – sama untuk melakukan penertiban kepada penjual rokok tanpa cukai. Dan ini sudah intens kami lakukan, kegiatan ini harus di dampingi oleh pihak bea cukai, karena kewenangan dari bea cukai. Kami belum bisa melakukan tindakan sendiri tanpa di dampingi oleh pihak bea cukai.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kemudian hasil barang bukti semua dibawa dan di amankan oleh bea cukai dan Insya Alloh Bulan Desember besok Minggu ke dua akan di adakan pemusnahan sekitar 9 juta batang rokok dengan berbagai merk, rencananya ada dua tempat kalau tidak di pendopo ya di Porong, tergantung dari bea cukai pelaksanaannya mau dimana. Seandainya ada perubahan acara Pak Menteri Keuangan juga akan hadir, tetapi juga akan menunggu berita dari Menteri Keuangan bersama bea cukai artinya kita sudah melaksanakan sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepada kami.

Semakin marak, tetapi satu sisi kami punya kewenangan penegasan dan penindakan. Setiap penindakan harus didampingi oleh bea cukai. Dan sejauh ini koordinasi kepada bea cukai tetap intens. Karena bea cukai ini sekarang personilnya juga terbatas, waktunya juga terbatas, dia menangani empat Kabupaten/ Kota bersama – sama melaksanakan penertiban.

Yany pun juga mengatakan bahwa penertiban terakhir telah dilakukan minggu kemarin hari Rabu atau hari Kamis kemarin. Mungkin masih ada terkait ini masih dilakukan.” Wong namanya bandel ya repot, ” Keluh Yany.

Sementara penindakan ini masih dibatas hilirnya di pedagang – pedagang kecil, sementara di hulunya jelas kewenangan bea cukai jadi pengendalian, pengawasan pita cukai, rokok kemudian jenis – jenis rokoknya yang diberikan itu kewenangan dari Cukai. Jadi keluar masuk rokok tanggung jawab dari cukai.



Terkait dengan penjualan rokok yang terang – terangan dan peredaran yang terang – terangan, Yany sebagai Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa sekarang masalahnya belum tau pemasoknya dari Sidoarjo atau dari luar Sidoarjo ini yang perlu kita dalam. Karena lintas wilayah itu sudah dilakukan upaya – upaya sama untuk penindakan bersama – sama dengan Satpol PP dengan Kabupaten yang lain.

Hasil dari pendalaman penindakan barang itu produk banyak berasal dari Malang, dari Madura dan Sidoarjo juga ada. Dan hasil penyidikan itu ada di bea cukai laporannya. Dan kami sudah dua tahun ini melaksanakan terus, pelanggaran itu pasti terjadi, karena itu urusan perut, minimal kita sudah ada efek jera.

” Jangan salahkan penjual salahkan juga pembeli, selama pembelinya tidak ada peminat pasti dia tidak akan di jual “

Dan ini paling dominan di sisi barat, dan kemarin yang telah di tindak total ada 200 ribu lebih berbagai merk, ungkanya. (Adv).



Diskominfo Sidoarjo Undang Dahlan Iskan Untuk Ajak Pegiat Medsos Kolaborasi Bangun Citra Positif Sidoarjo





SIDOARJO, SOROTMATA.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo mengundang pegiat Media Sosial/Medsos dalam Forum Kolaborasi Gov x Creator Connect di Hotel Rayz UMM, Malang, Senin (17/11/2025). Mereka diajak kolaborasi membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Forum yang pertama kali digelar Diskominfo Sidoarjo itu mengangkat tema “Kolaborasi Komunikasi Publik Berbasis Komunitas, Media Industri, dan Konten Kreatif”.

Tidak tanggung-tanggung, Diskominfo Sidoarjo mengundang lima narasumber berbobot dalam forum yang dilaksanakan dua hari ini, (17-18 November 2025). Antara lain CEO Media Digway Dahlan Ikan, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdilah Nasih, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Deny Haryanto serta pemilik akun Instagram @ndorokalong Wicaksono dan Desainer Grafis Kementerian Keuangan RI, M. Thoriq. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh admin Medsos OPD serta seluruh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) OPD dan Instansi Vertikal Sidoarjo seperti dari Polresta Sidoarjo, BNN Sidoarjo serta Influencer dan kelompok Informasi Masyarakat/KIM.

Plt. Kepala Diskominfo Sidoarjo, Eri Sudewo dalam sambutannya membuka forum tersebut menyampaikan bahwa saat ini manusia berada era di mana informasi bergerak sangat cepat. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat. Menurutnya komunikasi publik menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah harus mampu menghadirkan komunikasi publik yang mudah dipahami masyarakat.

“Dalam menghadapi perubahan ini, komunikasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan langkah pembangunan dapat dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Eri Sudewo juga menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Ia yakin lewat cara itu pemerintah mampu menghadapi tantangan disinformasi dan dinamika opini masyarakat. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan peran media, komunitas maupun para kreator konten dalam menientabani interaksi publik di ruang digital.

“Forum ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi publik yang lebih kreatif, kredibel, dan inklusif,” ucapnya.

Eri Sudewo berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kerjasama nyata antara OPD dan para kreator konten untuk menghadirkan narasi pembangunan yang lebih humanis dan mudah diterima masyarakat. Lewat forum semacam ini diharapkan juga akan mendorong lahirnya inovasi dalam penyampaian pesan publik melalui media kreatif, storytelling, dan pendekatan digital yang relevan.

“Pada akhirnya diharapkan dapat terbentuk ekosistem komunikasi publik Kabupaten Sidoarjo yang responsif, modern, dan berkelanjutan,” harapnya.

Eri Sudewo juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memperkuat transformasi digital pemerintahan. Kualitas layanan informasi akan terus ditingkatkan dan ruang partisipasi publik akan dibuka lebih luas lagi. Namun upaya tersebut harus dilakukan Bersama.

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mengapresiasi kehadiran seluruh peserta, termasuk rekan-rekan kreator, media, komunitas, dan mitra pemerintah yang telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Nuri)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Diskominfo Undang Dahlan Iskan Untuk Ajak Pegiat Medsos Kolaborasi Bangun Citra Positif Sidoarjo



Zonajatim.com, Malang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo mengundang pegiat Media Sosial/Medsos dalam Forum Kolaborasi Gov x Creator Connect di Hotel Rayz UMM, Malang, Senin (17/11). Mereka diajak kolaborasi membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Forum yang pertama kali digelar Diskominfo Sidoarjo itu mengangkat tema “Kolaborasi Komunikasi Publik Berbasis Komunitas, Media Industri, dan Konten Kreatif.”

Tidak tanggung-tanggung, Diskominfo Sidoarjo mengundang lima narasumber berbobot dalam forum yang dilaksanakan dua hari itu, (17-18 November 2025). Antara lain CEO Media Disway Dahlan Iskan, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdilah Nasih, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Deny Haryanto serta pemilik akun Instagram @ndorokakung Wicaksono dan Desainer Grafis Kementerian Keuangan RI, M. Thoriq. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh admin Medsos OPD serta seluruh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) OPD dan Instansi Vertikal Sidoarjo Seperti dari Polresta Sidoarjo, BNN Sidoarjo serta Influencer dan kelompok Informasi Masyarakat/KIM.

Plt Kepala Diskominfo Sidoarjo, Eri Sudewo dalam sambutannya membuka forum tersebut menyampaikan bahwa saat ini manusia berada era di mana informasi bergerak sangat cepat. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat. Menurutnya komunikasi publik menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah harus mampu menghadirkan komunikasi publik yang mudah dipahami masyarakat.



“Dalam menghadapi perubahan ini, komunikasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan langkah pembangunan dapat dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Eri Sudewo juga menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Ia yakin lewat cara itu pemerintah mampu menghadapi tantangan disinformasi dan dinamika opini masyarakat. Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan peran media, komunitas maupun para kreator konten dalam menjembatani interaksi publik di ruang digital.

“Forum ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi publik yang lebih kreatif, kredibel, dan inklusif,” ucapnya.

Eri Sudewo berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kerjasama nyata antara OPD dan para kreator konten untuk menghadirkan narasi pembangunan yang lebih humanis dan mudah diterima masyarakat. Lewat forum semacam ini diharapkannya juga akan mendorong lahirnya inovasi dalam penyampaian pesan publik melalui media kreatif, storytelling, dan pendekatan digital yang relevan.

“Pada akhirnya diharapkan dapat terbentuk ekosistem komunikasi publik Kabupaten Sidoarjo yang responsif, modern, dan berkelanjutan,” harapnya.

Eri Sudewo juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memperkuat transformasi digital pemerintahan. Kualitas layanan informasi akan terus ditingkatkan dan ruang partisipasi publik akan dibuka lebih luas lagi. Namun upaya tersebut harus dilakukan Bersama.

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat mengapresiasi kehadiran seluruh peserta, termasuk rekan-rekan kreator, media, komunitas, dan mitra pemerintah yang telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. MI